



DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# RENCANA AKSI TAHUN 2022



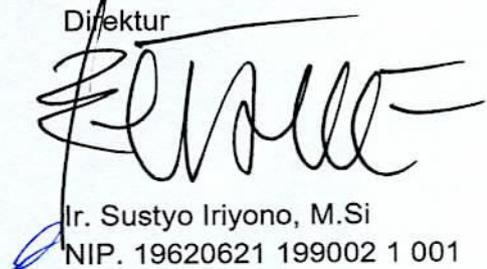
## KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2022 kedepan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan pengamanan Kawasan Hutan sebagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2022 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 serta Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan rencana aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2022  
Direktur



Ir. Susty Iriyono, M.Si  
NIP. 19620621 199002 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 adalah dokumen rencana aksi tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Dit. PPLHK terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi Dit. PPLHK yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2022, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2022 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPLHK. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Pencegahan dan Pengamanan Hutan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

## BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	31 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	28 Operasi
	Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya	400 Orang

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan perjanjian kinerja Dit. PPLHK TA 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Kawasan Hutan di 34 Provinsi (108.396 Ha)	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	13 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2	Dukungan Manajemen dan	Layanan	1 Layanan

	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
--	---	--	--

Jumlah Anggaran Kegiatan Dit. PPLHK:

- |   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| 1 | Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan                   | : | <b>17.938.955.000,-</b> |
| 2 | Kegiatan dikungan manajjemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya | : | <b>1.268.080.000,-</b>  |
|   | Jumlah   | : | <b>19.207.035.000,-</b> |

PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

No	Keterangan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2022	Satuan
1	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan Dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan	20.000	30.000	30.000	28.396	108.396	Hektar
2	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan</b>						
		Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	6	10	10	4	30	Dokumen
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1	3	4	1	9	Operasi
		Operasi Penyelamatan SDA	1	1	1	1	4	Operasi
		<b>Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal</b>						
		Pengumpulan Data	3	4	5	3	15	Dokumen

		dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal						
		Operasi Pembalakan Liar	0	1	1	1	3	Operasi
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1	1	1	0	3	Operasi
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK			1	1	2	Dokumen
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		1	1	1	3	Sosialisasi
		Penguatan Sistem Intelijen			1		1	Laporan
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan				1	1	Kegiatan
		<b><i>Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i></b>						
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	100	40	60	0	200	Orang

### BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pencegahan dan pengamanan hutan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Penyusunan rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman di bidang kehutanan dapat berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.